

Analisis Pengaruh Konflik India Pakistan Terhadap Keamanan Manusia Di Wilayah Kashmir

Agistyn Ashadi Putri
agistynashadi@gmail.com

Abstrak

Konflik India Pakistan di wilayah Kashmir ini telah terjadi cukup lama yakni dari abad ke-18 hingga sekarang. Adanya konflik ini tentunya menjadi pengaruh utama munculnya isu keamanan manusia di wilayah Kashmir, terlebih dari tahun 2018-2021. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh konflik India Pakistan terhadap keamanan manusia di Wilayah Kashmir. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep keamanan manusia (*Human Security*). Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa konflik India Pakistan sangat memberikan pengaruh yang serius terhadap keamanan manusia di wilayah Kashmir, dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pembatasan hak personal setiap orang di Kashmir. Dengan demikian dapat disimpulkan konflik yang terjadi antara India dan Pakistan sangat berdampak terhadap keamanan manusia di wilayah Kashmir.

Kata Kunci: Keamanan Manusia, Konflik India Pakistan, Pelanggaran HAM dan Hak Persona

Pendahuluan

Hubungan bilateral India dan Pakistan sudah terjalin tidak baik dalam kurun waktu yang cukup lama. Konflik yang terjadi antara dua negara di kawasan Asia Selatan itu semakin hari kian memburuk, terlebih dengan status India sebagai negara yang memiliki *power* paling besar diantara semua negara di Asia Selatan. Bagaimana tidak, India memiliki aspek – aspek pendukung yang membuatnya menjadi negara superpower di Asia Selatan seperti jumlah populasi penduduk terbesar kedua di dunia yakni sekitar 1,3 Milyar penduduk, PDB India yang terbilang cukup untuk ukuran negara berkembang, dan pasukan militer yang cukup tangguh jika dibandingkan dengan pasukan – pasukan militer di negara – negara Asia Selatan.¹

Disisi lain, Pakistan sebagai pihak yang berkonflik dengan India dapat dikatakan bertolak belakang dari India yakni dari aspek – aspek yang sebelumnya telah disebutkan. Pakistan tidak setangguh India dengan kapasitas negara yang masih dibawah India baik dari segala aspek seperti penduduk yang jumlahnya lebih sedikit sedikit, cakupan wilayah yang juga lebih kecil dari India dan keadaan ekonomi yang tidak begitu stabil.² Namun meskipun Pakistan memiliki banyak kekurangan jika dibandingkan dengan India, militer Pakistan memiliki kekuatan yang cukup tangguh hingga mendapat predikat negara dengan militer terkuat ke sembilan di dunia menurut *Global Firepower* (GFP).³

Konflik yang terus berlanjut antara kedua negara tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Dibalik ketegangan hubungan kedua negara tersebut terdapat faktor yang melatatarbelakangi terjadinya konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Faktor yang memicu terjadinya konflik ini adalah perebutan wilayah Kashmir. Namun selain itu terdapat faktor – faktor lain yang juga memicu terjadinya konflik antara kedua negara tersebut seperti konflik antar ras, perbedaan agama hingga stabilitas politik yang terancam, akan tetapi perebutan wilayah

¹ Burnadette Aderi Puspaningrum, 'Daftar Negara Di Asia Selatan: Ibu Kota, Ekonomi Dan Populasinya', *kompas.com*, 2022 <<https://www.kompas.com/global/read/2022/07/27/180000770/daftar-negara-di-asia-selatan--ibu-kota-ekonomi-dan-populasinya?page=all>> [accessed 16 November 2011].

² *Pakistan: Perkembangan Dalam Negara Pakistan* (Jakarta, 2022) <<https://kemlu.go.id/islamabad/en/read/pakistan/2374/etc-menu>>.

³ Muhama Syahril, 'Daftar Negara Dengan Militer Terkuat Di Dunia 2022 Versi GFP', 2022 <[https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/02/170000081/daftar-negara-dengan-militer-terkuat-di-dunia-2022-versi-gfp?page=all#:~:text=Pakistan berada di posisi kesembilan,2022 dengan skor PwrIndx%3A 0.1572.&text=Kekuatan angkatan darat Pakistan%3A 2.824,da](https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/02/170000081/daftar-negara-dengan-militer-terkuat-di-dunia-2022-versi-gfp?page=all#:~:text=Pakistan%20berada%20di%20posisi%20kesembilan,2022%20dengan%20skor%20PwrIndx%3A%200.1572.&text=Kekuatan%20angkatan%20darat%20Pakistan%3A%202.824,da)> [accessed 22 November 2022].

Kashmir masih menjadi faktor utama dan paling serius yang menyebabkan ketegangan antara India dan Pakistan.

Kashmir sendiri merupakan sebuah wilayah yang terletak di perbatasan India pada bagian Utara dan Pakistan pada bagian Barat yang mana beribukotakan Srinagar.⁴ Kashmir pada dasarnya merupakan bagian wilayah dari kerajaan Jammu dan Kashmir pada masa kolonial Inggris, namun telah terpecah belah saat kemerdekaan tahun 1947. Jammu dan Kashmir terbagi menjadi tiga bagian wilayah yakni Jammu, Kashmir dan Ladakh. Bagian Jammu, sebagian besar penduduknya memeluk agama Hindu, kemudian bagian Kashmir atau bisa disebut Lembah Kashmir dimana penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, dan pada bagian Ladakh mayoritas agama yang dianut oleh penduduknya adalah agama Buddha.⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Kashmir merupakan wilayah yang heterogen dengan beragamnya agama yang dianut oleh penduduknya serta ras dan etnis yang tentunya beragam pula. Meski demikian, Kashmir menjadi wilayah dengan mayoritas penganut agama islam yang besar. Dengan adanya berbagai macam latar belakang agama yang dianut oleh penduduk Kashmir berdampak pada munculnya konflik yang semakin mempengaruhi ketegangan yang terjadi antara India dan Pakistan.

Dalam konflik India dan Pakistan, Kashmir yang diberikan hak otonom oleh Inggris memutuskan untuk bergabung dengan India yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian asesi tahun 1954 tentang penggabungan wilayah Kashmir dan India.⁶ Namun Pakistan mulai mempertanyakan keabsahan perjanjian tersebut hingga membuat Pakistan tidak menerima hasil dari perjanjian tersebut.

Tindakan yang dilakukan Pakistan memancing kemarahan India sehingga memicu terjadinya konflik senjata antara kedua Negara tersebut. India lantas mengirimkan pasukan

⁴ 3 *Negara Yang Memperebutkan Wilayah Kashmir*, *Sindo News* (Jakarta, 2022) <<https://international.sindonews.com/read/873327/45/3-negara-yang-memperebutkan-wilayah-kashmir-1662030573>> [accessed 3 October 2022].

⁵ Demita Ayuwanda Mukti and Anggun Puspitasari, 'Dampak Konflik India-Pakistan Di Wilayah Kashmir Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019', *Journal of Contemporary Diplomacy*, 4.2 (2019), 103–104 <<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/223/103>>.

⁶ Ahmad Burhan Hakim and Moh Sasiyin, 'Kashmir Dalam Pusaran Konflik Antara India Dan Pakistan', *Journal Of International Relations*, 1.1 (2022), hlm 40–43 <<https://doi.org/10.36232>>.

keamanannya ke perbatasan Kashmir untuk menjaga klaim wilayah teritorialnya. Pakistan pun turut melakukan hal yang sama dengan dalih mengambil alih Kashmir menjadi bagian Pakistan seutuhnya. Kashmir yang menjadi wilayah yang disengketakan tentunya mendapatkan dampak yang cukup serius baik terhadap wilayahnya maupun penduduk Kashmir itu sendiri.

Adanya konflik yang semakin memanas ini, mengakibatkan munculnya masalah – masalah baru di wilayah Kashmir. Masyarakat Kashmir menjadi korban dari adanya konflik yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Kashmir mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, jatuhnya warga sipil akibat perang senjata antara India Pakistan hingga penahanan warga sipil secara sengaja oleh India dan Pakistan.⁷ Konflik yang terus menerus terjadi antara kedua Negara tidak kunjung menemukan titik akhir bahkan hingga abad 20-an. Terbukti pada tahun 2018, sebanyak lebih dari 500 orang telah menjadi korban dari aksi tembak – menembak di wilayah Kashmir.⁸ Hal tersebut lantas menjadi bukti nyata gejala berkepanjangan yang terjadi antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir.

Dapat dikatakan bahwa serangkaian aksi kekerasan yang menewaskan banyak orang sejak tahun 2018 membuat keadaan di Kashmir semakin memburuk, terlebih terhadap hidup orang banyak. Akibat hal tersebut, India mulai melakukan tindakan yang menimbulkan pertentangan besar dari Pakistan yakni India mencabut hak otonom Kashmir pada tahun 2019.⁹ Hal ini secara langsung membuat Kashmir kehilangan kendali penuh atas wilayahnya sendiri. Akibat adanya pencabutan hak otonom tersebut, keadaan di wilayah Kashmir semakin parah seperti bertambahnya korban jiwa akibat serangan udara yang dilakukan kedua Negara, pembatasan jam malam penduduk Kashmir, pemadaman komunikasi, dilarangnya aksi protes dan demonstrasi, penahanan massal, ditambah dengan munculnya pandemic Covid-19 yang semakin memperburuk suasana di Kashmir dimana Kashmir

⁷ Barak Hariz, 'Konflik India - Pakistan, Kedua Negara Sepakati Pertukaran Informasi Nuklir Dan Tahanan', liputan6.com, 2023 <<https://www.liputan6.com/global/read/5169203/konflik-india-pakistan-kedua-negara-sepakati-pertukaran-informasi-nuklir-dan-tahanan>> [accessed 4 February 2023].

⁸ 'Kashmir: Mengapa Kekerasan Terbaru Membuat Dunia Sangat Khawatir?', bbc.com (Jakarta, 20 February 2019) <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47296254>>.

⁹ 'Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir Oleh India Dianggap Kontroversial? Tiga Hal Yang Layak Diketahui', *BBC News*, 2019 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49250404>> [accessed 26 February 2023].

mengalami kerugian yang menyebabkan sekitar 500.000 penduduk kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi.¹⁰

Terjadinya banyak kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia ditambah dengan munculnya terorisme di Kashmir membuat Kashmir mengalami gejala keamanan kemanusiaan. Korban jiwa mulai banyak berjatuhan namun Kashmir masih kesulitan mengambil kendali atas wilayahnya. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara India dan Pakistan mulai dari penyelesaian secara bilateral antara kedua Negara hingga intervensi pihak lain, namun upaya – upaya yang telah dilakukan tetap tidak menghasilkan titik damai.

Tinjauan Pustaka

Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)

Gagasan keamanan manusia (*Human Security*) mulai muncul dari adanya fenomena yang merugikan manusia seperti gangguan moneter ekonomi, kemiskinan, penolakan terhadap nilai – nilai tradisional, degedredasi lingkungan, konflik sosial dan lain sebagainya.¹¹ Adanya fenomena – fenomena tersebut menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap pola keamanan manusia yang akhirnya menyita perhatian internasional. konsep keamanan manusia kemudian mulai diusulkan melihat dari gagasan kemanan manusia tersebut sesuai dengan yang diperkenalkan UNDP.

Konsep keamanan manusia (*Human Security*) sebenarnya masih belum memiliki makna tunggal sehingga penafsiran konsep keamanan manusia masih diperkenalkan secara umum. Kompleksitas kajian keamanan manusia dalam studi Hubungan Internasional memberikan pengertian yang luas sehingga diperlukan banyak sumber dan referensi untuk memahami makna sebenarnya dari keamanan manusia. Namun banyak penafsiran terkait

¹⁰ Rifat Fareed, 'Kashmir: Setahun Terkunci Dan Kehilangan Otonomi', *Dw.Com*, 2020 <<https://www.dw.com/id/kashmir-setahun-terkunci-dan-kehilangan-otonomi/a-54440870>> [accessed 26 February 2023].

¹¹ Dildora Tadjibaeva, *Human Security Concept and Measurement, Occasional Paper* (New Delhi, 2000) <https://www.academia.edu/download/31598206/Human_security_concept_and_measurement.pdf>.

konsep keamanan manusia secara eksplisit dan dari sudut pandang yang berbeda yang dapat memberikan gambaran yang lebih dalam terkait konsep keamanan manusia itu sendiri.

Konsep keamanan manusia atau *Human Security* seringkali memiliki kaitan yang erat dengan isu – isu tradisional yang mana melibatkan negara – negara sebagai aktor utama dalam kajiannya. Namun seiring berjalannya waktu, konsep keamanan manusia mulai berkembang dimana munculnya isu non-tradisional yang menjadi kajian studi Hubungan Internasional mulai mendapat perhatian. Dalam isu non-tradisional yang didalamnya terdapat isu HAM, konsep keamanan manusia mulai dibenahi sehingga kajian keamanan manusia tidak hanya berfokus pada kesejahteraan aktor Negara akan tetapi keamanan manusia juga untuk mencapai kesejahteraan semua pihak, baik entitas Negara maupun individu.¹²

Secara umum UNDP membagi konsep keamanan manusia menjadi 7 kategori sesuai dengan yang dipublikasikan melalui *Human Development Report* pada tahun 1994 dimana ketujuh kategori tersebut yakni:¹³

1. Keamanan Ekonomi (*Economic Security*)
2. Keamanan Pangan (*Food Security*)
3. Keamanan Kesehatan (*Health Security*)
4. Keamanan Lingkungan (*Environment Security*)
5. Keamanan Personal (*Personal Security*)
6. Keamanan Komunitas (*Community Security*)
7. Keamanan Politik (*Political Security*)

Secara garis besar, terdapat 3 aspek yang harus dijunjung dan dijamin adanya dalam melihat konsep keamanan manusia. Ketiga aspek tersebut adalah *Freedom From Fear*, *Freedom From Want* dan *Freedom From Indignity*.¹⁴ *Freedom From Fear* atau kebebasan dari rasa takut dapat diartikan sebagai perlindungan setiap individu terhadap ancaman yang diarahkan terhadap

¹² Sonny Sudiar, 'Pendekatan Keamanan Manusia Dalam Studi Perbatasan Negara', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7.2 (2019), hlm 60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.72139>>.

¹³ Helmut Volger and Kofi Annan, *Human Development Reports, United Nations Development Programme* (New York, 1994) <https://doi.org/10.1163/9789004481206_047>.

¹⁴ United Nations, 'What Is Human Security', *United Nations Trust Fund For Human Security* <<https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/>> [accessed 18 February 2023].

keamanan dan integritas fisik mereka dan mencakup berbagai bentuk kekerasan yang mungkin timbul dari Negara lain, tindakan suatu Negara terhadap warganya, tindakan suatu kelompok terhadap kelompok lain, dan tindakan individu terhadap individu lainnya. Kemudian *Freedom From Want* adalah perlindungan individu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan aspek ekonomi, social serta lingkungan dari kehidupan dan penghidupan. Terakhir *Freedom From Indignity* merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan manusia yang memungkinkan individu untuk membuat pilihan dan mencari peluang yang memberdayakan mereka.¹⁵

Melihat dari pemaparan yang diberikan oleh UNDP, konsep keamanan manusia kemudian mulai diadaptasi oleh aktor – aktor negara dalam melihat konsep keamanan manusia (*Human Security*) dari aspek yang lebih spesifik bagi aktor – aktor negara tersebut. Pada akhir tahun 1990-an Kanada dan Jepang mulai mengadopsi konsep keamanan manusia sebagai bentuk perumusan kebijakan, sehingga lahirlah konsep keamanan manusia (*Human Security*) versi Kanada dan Jepang.¹⁶

Setelah melihat penjelasan terkait konsep keamanan manusia yang dipaparkan oleh UNDP dengan varian turunannya yakni konsep keamanan manusia (*Human Security*) oleh Kanada dan Jepang, maka dapat digambarkan bahwa konsep keamanan manusia adalah sebuah bentuk penjagaan, perlindungan, jaminan terhadap keamanan, kesejahteraan dan perdamaian setiap individu dari semua ancaman yang ada baik itu ancaman tradisional maupun non tradisional, sehingga dapat tercapainya *Freedom From Want*, *Freedom From Fear* dan *Freedom From Indignity* bagi seluruh individu. Selain itu, ketiga aspek yang telah disebutkan sebelumnya juga menekankan bahwa bagaimana ketiganya dapat menjamin keamanan dari tujuh kategori yang disebutkan UNDP.

¹⁵ Inter-American Institute Of Human Rights, 'What Is Human Security?', *iidh.ed.cr* <https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contentid=ea75e2b1-9265-4296-9d8c-3391de83fb42&Portal=IIDHSeguridadEN#tres> [accessed 18 February 2023].

¹⁶ Eric Remacle, 'Approaches to Human Security: Japan, Canada, and Europe in Comparative Perspective', *The Journal of Social Science* 66, 8, 2008, hlm 34.

Jika melihat kasus yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan gambaran terkait konflik India Pakistan terhadap keamanan manusia di wilayah Kashmir dengan menggunakan sudut pandang konsep keamanan manusia (*Human Security*). Mengacu pada tujuh kategori yang telah diperkenalkan oleh UNDP serta tiga aspek pokok keamanan manusia, maka sangat penting untuk melihat apakah tujuh kategori dan tiga aspek tersebut sudah terjamin adanya di wilayah Kashmir mengingat konflik yang terjadi antara India dan Pakistan terus berlanjut tanpa adanya kejelasan.

Metode

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, dimana dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe analisis yang ada pada penelitian ini adalah tipe analisis Induksionis. Tipe analisis induksionis merupakan tipe analisis yang mana unit eksplanasinya lebih tinggi daripada unit analisisnya.¹⁷ Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data melalui studi kepustakaan yakni mencari data dan referensi baik melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, website yang kredibel maupun dokumen – dokumen yang bersumber dari institusi pemerintahan. Ruang lingkup waktu yang ada dalam penelitian ini yakni berkisar dari tahun 2018-2021.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Singkat Konflik India – Pakistan

Pada abad ke 16 kolonial Inggris mulai masuk ke India atas dasar kepentingan dagang rempah – rempah. Namun lambat laun, eksistensi Inggris di tanah India mulai menjadi ancaman bagi India dimana Inggris yang pada awalnya datang dalam rangka kepentingan dagang saja akhirnya mulai mencampuri semua aspek pemerintahan India hingga berhasil

¹⁷ MSi. Prof. Dr. Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung, 2012) <<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>>.

menaklukan India untuk melakukan penjajahan. Masa penjajahan Inggris di India berlangsung sangat lama yakni mulai dari pertengahan abad ke-18 sampai abad ke-19.¹⁸

Pada awal pertengahan abad ke-18, Inggris mulai melakukan penjajahan dengan keinginan untuk menguasai India. Hal ini dapat dilihat dari naiknya seorang Jenderal Inggris sebagai pemimpin muda India kala itu sebagai salah satu langkah awal untuk memimpin wilayah – wilayah India yang masih terpisah – pisah.¹⁹ Pada saat itu memang wilayah – wilayah India masih belum bersatu namun teritorial dari setiap wilayah tersebut merupakan milik India. Naiknya Jenderal Inggris ini sebagai pemimpin muda wilayah India kala itu tentunya dilatarbelakangi oleh keinginan Inggris untuk menguasai seluruh wilayah India tanpa terkecuali sehingga Inggris mulai mencari jalan alternatif dalam mewujudkan keinginannya tersebut. Semakin kuatnya pengaruh Inggris di India membuat pertahanan India melemah sehingga memberikan ruang yang cukup besar kepada Inggris untuk terus melakukan penjajahan terhadap India. Namun dengan melemahnya India tidak membuat India tinggal diam. India melakukan pemberontakan – pemberontakan kepada Inggris. Hal tersebut terus berlanjut hingga merdekanya India dari jajahan Inggris pada abad ke-19.

Pada abad ke-19 tepatnya pada tahun 1947 Inggris memberikan kemerdekaan pada India setelah India membentuk suatu kongres yang terdiri dari para wakil India yang berasal dari berbagai latar belakang agama yang berbeda yang kemudian meminta pembebasan kepada Inggris. Dibentuknya kongres ini justru menjadi pemicu konflik antara umat beragama di India khususnya agama Hindu dan Islam. Hal ini terjadi karena Kongres tersebut lebih condong dan dominan terhadap kepentingan kaum Hindu dibandingkan dengan agama lainnya sehingga menimbulkan pertentangan dari kaum muslim sampai terjadilah konflik antar agama di India. Dengan adanya konflik antar agama yang terjadi ini kemudian memicu perpecahan di kalangan warga India, dimana kaum muslim yang merasa dinomorduakan melakukan pemberontakan dan melakukan aksi separatisme. Kaum muslim mencoba untuk memisahkan diri dan membentuk negara

¹⁸ Syauqi. hlm 108.

¹⁹ Ayunda and Aria. hlm 917-918.

islam dengan seluruh kaum muslim yang merasa diabaikan kepentingannya. Aksi ini kemudian membuahkan hasil dimana pada 14 Agustus 1947 kaum muslim resmi membentuk negara islam yang kemudian bernama Pakistan.²⁰

Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, India justru berkonflik dengan Pakistan atas dasar perbedaan agama ditambah dengan perebutan wilayah yakni wilayah Kashmir. Perebutan wilayah Kashmir ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Inggris menjelang kemerdekaan India terkait dengan status teritorial wilayah – wilayah bekas jajahan Inggris. Kebijakan yang dikeluarkan Inggris untuk meminimalisir konflik internal di India adalah dengan memberikan kebebasan kepada setiap wilayah bekas jajahannya untuk memilih apakah ingin berdiri sendiri dan menjadi negara *Independent* atau bergabung ke salah satu negara antara India dan Pakistan. Kashmir sebagai wilayah bekas jajahan Inggris kemudian memilih untuk berdiri sendiri dan membentuk negara mandiri.²¹ Hal inilah yang kemudian menjadi faktor semakin bersitegangnya India dan Pakistan karena perebutan wilayah Kashmir yang letaknya berada di perbatasan wilayah India dan Pakistan.

Keputusan Kashmir yang memilih menjadi negara mandiri menimbulkan dampak terhadap hubungan India dan Pakistan. Kashmir dengan segala keadaan wilayahnya saat itu menyadari bahwa Kashmir tidak memungkinkan untuk berdiri menjadi sebuah negara, dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, jumlah penduduk yang masih terbilang sedikit serta elemen – elemen pendukung lain yang memadai sebagai syarat berdirinya suatu negara yang baik. Akhirnya Kashmir dengan pemimpinnya saat itu Harry Sing membuat keputusan untuk bergabung dengan India. Penandatanganan penggabungan wilayah Kashmir dan India ini dilakukan sesuai dengan perjanjian asesi pada 26 Oktober 1947.²²

Keputusan Kashmir untuk bergabung dengan India membuat Pakistan geram, Pakistan beranggapan bahwa penggabungan wilayah India dan Kashmir tidak sah dan

²⁰ Muhammad Ruslan, (Tesis) “Pemikiran Pembentukan Negara Pakistan” (Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2012), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1421>.

²¹ Hakim and Sasiyin. hlm 40-49.

²² Hakim and Sasiyin hlm 270.

tidak dilakukan dengan mempertimbangkan keinginan penduduk Kashmir. Harry Sing dianggap membuat keputusan secara sepihak hanya karena dirinya berasal dari latar belakang agama yang sama dengan mayoritas penduduk India yakni agama Hindu. Pakistan juga melihat bahwa penduduk Kashmir ingin bergabung dengan Paksitan atas dasar kesamaan latar belakang agama yakni agama islam. Hal inilah yang membuat Pakistan tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk menggabungkan Kashmir dengan Pakistan karena mayoritas penduduk Kashmir merupakan kaum muslim. Pakistan melakukan berbagai cara untu merebut Kashmir menjadi bagian wilayahnya. Ketegangan antara dua negara tersebutpun kian memburuk.

2. Pelanggaran yang terjadi di Kashmir akibat konflik India Pakistan

a. Pelanggaran yang terjadi dari tahun 2018-2021

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2018-2021 telah banyak terjadi aksi kekerasan dan pelanggaran terhadap masyarakat Kashmir. Kekerasan dan pelanggaran ini mulai terlihat dari adanya eskalasi konflik di wilayah Kashmir yang mulai mengalami peningkatan dari tahun 2018 dimana pada tahun itu telah terjadi aksi serang menyerang antara pasukan India dan Pakistan di daerah perbatasan Kashmir yang kemudian berhasil menewaskan setidaknya lebih dari 500 orang baik dari kalangan warga sipil maupun pasukan India dan Pakistan.²³ Selain itu terorisme perlahan mulai terlihat dengan jelas dimana aksi terorisme mulai dilakukan secara terang – terangan. Terbukti ancaman teroris terjadi di sepanjang lembah Kashmir dengan bentuk aksi bom bunuh diri yang menyebabkan puluhan aparat kepolisian dan warga sipil terluka.²⁴

Munculnya ancaman terorisme di Kashmir ini tidak lain dipicu oleh konflik berkepanjangan yang terjadi antara India dan Pakistan. Aktor – aktor yang terlibat dalam konflik ini sudah teralihkan fokusnya hanya untuk perebutan wilayah, sehingga

²³ 'Kashmir: Mengapa Kekerasan Terbaru Membuat Dunia Sangat Khawatir?', *BBC News Indonesia*, 2019 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47296254>> [accessed 18 February 2023].

²⁴ 'Bom Di Kashmir: 40 Polisi Tewas, India Salahkan Kelompok Muslim Di Pakistan', *BBC News Indonesia*, 2019 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47248432>> [accessed 28 February 2023].

masalah – masalah lain yang mulai muncul tidak di hiraukan, salah satunya adalah ancaman terorisme ini. Selain itu, terorisme di Kashmir muncul karena aksi demonstrasi dan protes yang dibatasi sehingga tidak sedikit orang mulai menyuarakan kemarahannya melalui tindakan terorisme.²⁵ Disisi lain, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terus terjadi. Hal ini bahkan sudah menjadi pelanggaran sejak abad ke-19. Namun demikian, tanda – tanda berakhirnya pelanggaran Hak Asasi Manusia ini tidak kunjung terlihat sehingga membuat keadaan masyarakat Kashmir semakin tertindas.

Beranjak dari tahun 2018, pelanggaran yang terjadi di Kashmir semakin berat dimana pada tahun 2019 terjadi puncak masalah yang cukup memberikan pengaruh terhadap geopolitik Kashmir. Pada tahun 2019 India melakukan aksi pencabutan hak otonom Kashmir secara sewenang – wenang yang kemudian menimbulkan aksi protes dan demonstrasi besar – besaran oleh penduduk Kashmir. Hak otonom Kashmir ini sendiri termuat dalam Pasal 370 Undang – Undang Konstitusi India yang berisikan kewenangan Kashmir untuk memutuskan arah masa depan wilayahnya dan hubungannya dengan Negara – Negara lain.²⁶ Dengan dicabutnya hak otonom Kashmir ini otomatis menjadi pertanda bahwa India bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup wilayah Kashmir dan Kashmir sudah tidak mempunyai wewenang yang utuh terhadap wilayahnya.

Sejak dicabutnya Pasal 370 Undang – Undang Konstitusi India pada Agustus 2019, tercatat sudah terjadi aksi protes dan demonstrasi sebanyak kurang lebih 500 kali di Kashmir.²⁷ Banyaknya aksi protes yang dilayangkan penduduk Kashmir menjadi bukti kemarahan penduduk Kashmir atas sikap kesewenangan India terhadap otoritas wilayah Kashmir. Selain itu, penduduk Kashmir juga menginginkan India

²⁵ Wonjune Hwang, 'Kashmir as a Symbol of Pakistan: Why Violence in Kashmir Never Stop?', *Jurnal Politik Internasional*, 21.1 (2019), hlm. 29-30 <<https://doi.org/10.7454/global.v21i1.360>>.

²⁶ Vineeth Krishna, 'Article 370 and the Constituent Assembly Debates', *Constitution Of India*, 2019 <https://www.constitutionofindia.net/blogs/article_370_and_the_constituent_assembly_debates> [accessed 7 March 2023].

²⁷ 'India Sebut 500 Demo Terjadi Di Kashmir, Korban Luka Ratusan', *CNN Indonesia*, 2019 <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190828181327-113-425463/india-sebut-500-demo-terjadi-di-kashmir-korban-luka-ratusan>> [accessed 8 March 2023].

untuk menghentikan tindakan pelanggaran yang dilakukan terhadap warga sipil terutama para aktivis yang meminta keadilan atas wilayah Kashmir karena tindakan seperti penangkapan dan juga pembatasan perjalanan serta penutupan layanan komunikasi sudah merenggut kebebasan warga sipil untuk bersuara dan meminta keadilan yang seharusnya didapatkan.

Kekacauan yang terus terjadi dan semakin meningkat seiring berjalannya waktu sejak 2018 cukup sulit dibendung, ditambah dengan pelanggaran yang dilakukan pihak India terhadap penduduk Kashmir semakin memperburuk keadaan. Dari tahun 2019 yang penuh dengan konflik dan masalah – masalah pelanggaran yang terjadi, kini dibarengi dengan munculnya pandemi Covid-19. Pandemi yang muncul ini kemudian semakin meningkatkan ketegangan yang terjadi antara India dan Pakistan.

Ditengah huru – hara Covid-19, ketegangan antara India dan Pakistan justru semakin memanas dimana Militer kedua Negara tersebut saling adu baku tembak yang akhirnya menyebabkan tewasnya warga sipil di Kashmir.²⁸ Fakta bahwa kedua Negara mengabaikan pandemi Covid-19 yang semakin mempersulit hidup penduduk Kashmir dan terus melakukan perang senjata serta baku tembak di wilayah perbatasan semakin mengancam ketenangan hidup masyarakat Kashmir.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi dari tahun ke tahun terutama 4 tahun kebelakang memberikan banyak pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Kashmir. Setelah berbagai bentuk konflik senjata yang terjadi antara India dan Pakistan serta pelanggaran yang dialami setiap individu di Kashmir, akhirnya pada tahun 2021 India dan Pakistan melakukan perjanjian gencatan senjata yang berarti

²⁸ Muhaimin, 'India Dan Pakistan Perang Singkat Di Tengah Wabah Corona', *Sindo News*, 2020 <<https://international.sindonews.com/read/144/40/india-dan-pakistan-perang-singkat-di-tengah-wabah-corona-1586711072>> [accessed 8 March 2023].

penghentian konflik antara kedua Negara tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.²⁹

b. Pembatasan kebebasan berbicara dan berpendapat

Berangkat dari pelanggaran pihak India dan Pakistan dalam menjaga keselamatan warga sipil selama konflik senjata berlangsung, perlu dilihat masalah – masalah lain yang muncul secara berdampingan dalam jarak waktu yang begitu dekat. Tahun 2018 yang menjadi tahun awal menegangnya hubungan India dan Pakistan yang dibuktikan dengan kesewenangan kedua pihak dalam mengenyampingkan keselamatan warga sipil. Kemudian konflik yang semakin memanas dengan mencuatnya tindakan India yang mencabut hak otonom Kashmir yakni pasal 370 menimbulkan banyak pertentangan dari berbagai kalangan salah satunya Pakistan.³⁰

Tindakan India ini menimbulkan aksi protes dan demonstrasi yang kemudian berakhir dengan jatuhnya banyak korban jiwa. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan India yang memberikan respon terhadap aksi protes dan demonstrasi tersebut yang berupa pembatasan aksi protes dan demonstrasi serta penangkapan dan penahanan sejumlah aktivis. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan India mengancam hak asasi manusia serta keamanan personal masyarakat Kashmir dimana kebebasan berpendapat dan berbicara mereka dibatasi.³¹ Pada dasarnya dalam konsepsi keamana manusia, jaminan terhadap hak berbicara sangat dijunjung karena hal tersebut merupakan hak setiap individu. Jika mengacu pada konsep keamanan manusia dimana didalamnya sangat menekankan yang namanya *Freedom From Want* yakni kebebasan untuk berkeinginan, dimana setiap

²⁹ Danish Ismail, 'India, Pakistan Sepakat Hentikan Baku Tembak Di Wilayah Kashmir', *Antara News*, 2021 <<https://www.antaraneews.com/berita/2017278/india-pakistan-sepakat-hentikan-baku-tembak-di-wilayah-kashmir>> [accessed 26 February 2023].

³⁰ 'Kashmir: Mengapa Kekerasan Terbaru Membuat Dunia Sangat Khawatir?', *bbc.com* (Jakarta, 20 February 2019) <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47296254>>.

³¹ Lina Nur Khofifah, Ika Riswanti Putranti, and Marten Hanura, 'Intervensi Kemanusiaan Dalam Upaya Penanganan Isu Pelanggaran HAM Penduduk Kashmir Pasca Pencabutan Hak Otonomi Khusus Wilayah', *Journal of International Relations*, 8.3 (2022), hlm. 36-37 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/34425%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/34425/27158>>.

individu memiliki haknya masing masing untuk bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa ada batasan.

c. Pencabutan hak untuk hidup dengan sejahtera

Dengan adanya pencabutan hak otonom Kashmir ini ternyata melanggar keamanan personal dalam bidang politik. Mengapa demikian, hal ini karena hak otonom yang termuat dalam pasal 370 Konstitusi India tersebut mengandung aturan bahwasanya Kashmir hanyalah wilayah yang dapat diduduki dan dipimpin oleh keturunan Kashmir asli.³² Namun sejak dicabutnya pasal tersebut, maka orang – orang diluar etnis asli Kashmir dapat membeli tanah dan tinggal di Kashmir. Selain itu, penguasa pemerintahan Kashmir yang awalnya hanya boleh dijabat oleh etnis Kashmir sudah tidak berlaku lagi. Dengan kata lain pemegang kekuasaan di Kashmir boleh berasal dari luar etnis Kashmir. Hal ini tentunya akan mengganggu demografi Kashmir sebagai satu – satunya wilayah India dengan mayoritas muslim. Dengan itu, maka pelanggaran yang dilakukan India dengan mencabut secara sewenang – wenang hak otonom yang tercantum dalam Pasal 370 Undang – Undang Konstitusi India dikatakan sebagai pelanggaran terhadap keamanan personal dalam bidang politik.

Hal ini semakin memperjelas pelanggaran hak asasi manusia dan hak personal dalam bidang politik karena bertentangan dengan konsepsi kemanan manusia yakni Freedom From Indignity yang menjunjung kebebasan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidupnya sehingga setiap orang dapat mencari peluang untuk memberdayakan mereka. Dalam kasus pencabutan hak otonom Kashmir yang kemudian menyebabkan hilangnya peran masyarakat Kashmir secara utuh terhadap wilayahnya sendiri mengakibatkan masyarakat tidak bias secara leluasa mengendalikan wilayahnya. Hal ini juga akan berdampak pada kapabilitas masyarakat Kashmir untuk mensejahterakan diri mereka karena adanya campur tangan pihak lain dalam pemerintahan. Dengan demikian, hal

³² Khofifah, Putranti, and Marten Hanura.hlm 32-33.

ini dapat dikatakan melanggar hak personal setiap orang di Kashmir dalam bidang politik karena tidak sesuai dengan konsep keamanan manusia.

d. Pengabaian terhadap kebutuhan mendasar

Banyaknya gejala yang muncul seiring dengan dicabutnya hak otonom Kashmir sudah sangat mengancam keamanan manusia terkhusus keamanan personal. Namun demikian, masalah yang muncul tidak hanya sebatas itu saja. Disamping semakin memanasnya konflik antara India dan Pakistan serta banyaknya pelanggaran yang terjadi, pandemic Covid-19 justru muncul dan semakin memperparah keadaan. Banyak Negara mengalami krisis ekonomi akibat adanya pandemic ini, termasuk salah satunya Kashmir sebagai wilayah yang disengketakan. Selama pandemi Covid-19, tingkat militerisasi semakin meningkat yang mengakibatkan semakin terkekangnya warga sipil Kashmir. Selain itu, pembatasan layanan kesehatan juga dilakukan oleh pihak India.³³ Meningkatnya jumlah korban Covid-19 di Kashmir justru membuat pihak India semakin sewenang – wenang, hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya satu dokter untuk 3900 korban Covid-19.³⁴

Covid-19 di Kashmir membuat pihak India berlaku sewenang – wenang dengan membatasi jam malam, menutup total akses jalan dan melakukan penguncian wilayah serta pemutusan layanan komunikasi.³⁵ Selain itu, pihak India mengklaim bahwa semua kebijakan yang diterapkan selama masa pandemic tersebut adalah bukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, namun untuk menekan aksi protes dan demonstrasi karena pihak India merasa khawatir akan kebebasan berbicara masyarakat Kashmir.³⁶ Hal tersebut tentunya melanggar hak personal dimana

³³ Florence and others.hlm 275.

³⁴ Rhany Chairunissa Rufinaldo, 'EKSKLUSIF – Covid-19 Dan Kekerasan Yang Tak Kunjung Reda Ciptakan Kekacauan Di Kashmir', *Ankara*, 2020 <<https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/eksklusif-covid-19-dan-kekerasan-yang-tak-kunjung-reda-ciptakan-kekacauan-di-kashmir/1841708>> [accessed 16 March 2023].

³⁵ Rifat Fareed, 'Kashmir: Setahun Terkunci Dan Kehilangan Otonomi', *dw.com*, 2020 <<https://www.dw.com/id/kashmir:setahun-terkunci-dan-kehilangan-otonomi/a-54440870>> [accessed 26 February 2023].

³⁶ DW, 'Kashmir: Setahun Terkunci Dan Kehilangan Otonomi', *Tempo*, 2020 <<https://www.tempo.co/dw/3065/kashmir-setahun-terkunci-dan-kehilangan-otonomi>> [accessed 19 March 2023].

penutupan akses jalan, pembatasan layanan komunikasi dan penguncian wilayah secara penuh dapat menghambat kelangsungan hidup masyarakat Kashmir.

3. Pengaruh Konflik India–Pakistan Terhadap Keamanan Manusia di Wilayah Kashmir

a. Keamanan Personal

Keamanan personal merupakan salah satu komponen yang ada dalam kategori keamanan manusia yang disebutkan oleh UNDP yang dimana harus terjamin pencapaiannya terhadap seluruh individu. Namun dalam konflik perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan, terjadi banyak pelanggaran yang merujuk pada pelanggaran terhadap keamanan personal.³⁷

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2018-2021 telah banyak terjadi pelanggaran terhadap keamanan personal masyarakat Kashmir. Dimulai dengan adanya peningkatan konflik yang banyak menewaskan masyarakat sipil, dimana seharusnya masyarakat sipil mendapatkan perlindungan dari konflik yang terjadi diluar kendali mereka.³⁸

Konflik yang terus berlangsung antara India dan Pakistan ini juga memicu terjadinya pelanggaran keamanan personal dalam bentuk lain seperti adanya tindakan pelecehan terhadap kaum perempuan yang dilakukan oleh pasukan militer India terhadap masyarakat Kashmir.³⁹ Dengan adanya tindakan pelecehan yang dilakukan pihak India terhadap kaum perempuan di Kashmir sudah otomatis melanggar keamanan personal para perempuan Kashmir, karena sejatinya baik semua gender berhak untuk mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan dalam hidup mereka.

Selain itu, pelanggaran lain yang terjadi di Kashmir yang semakin menunjukkan bahwa keamanan personal tidak terjamin adalah dengan adanya aksi pencabutan hak otonom Kashmir yakni pasal 370 Undang – Undang Konstitusi

³⁷ Mukti and Puspitasari. hlm 105.

³⁸ Khoififah, Putranti, and Marten Hanura. hlm 369.

³⁹ Ahmad Shah. hlm 11.

India.⁴⁰ Aksi pencabutan ini kemudian mendapat sambutan yang tidak ramah dari masyarakat Kashmir mengingat hal ini merugikan Kashmir dan masyarakat Kashmir mulai dari tidak diberikannya izin untuk melakukan demonstrasi, penangkapan terhadap sejumlah aktivis hingga pembatasan kebebasan berbicara dan berpendapat.⁴¹ Hal tersebut tentunya melanggar hak setiap personal sesuai dengan konsep keamanan manusia baik yang dijbarkan oleh UNDP dan juga aspek penting keamanan manusia itu sendiri yakni *Freedom From Want, Freedom From Fear dan Freedom From Indignity*.⁴²

b. Keamanan Kesehatan

Pada tahun 2019 dimana sedang terjadinya dan meningkatnya kasus pandemi Covid-19, semua Negara mengalami kendala yang cukup memberikan hambatan terhadap kelangsungan hidup Negara mereka termasuk didalamnya India, Pakistan dan Kashmir. Ditengah huru – hara pandemi Covid-19, ditambah dengan adanya konflik yang terus terjadi antara India dan Pakistan di Kashmir semakin menambah beban hidup masyarakat Kashmir.

Adanya konflik yang berkepanjangan yang terjadi antara India dan Pakistan membuat keadaan di Kashmir semakin memburuk, disamping terus meningkatnya kasus Covid-19. Konflik yang terjadi antara India dan Pakistan mengakibatkan kelalaian terhadap penanganan kasus Covid-19 di Kashmir. Adanya konflik antara India dan Pakistan ini membuat fokus mereka teralihkan sehingga penanganan kasus Covid-19 tidak berjalan dengan baik.

India dan Pakistan hanya berfokus terhadap sengketa wilayah Kashmir tanpa memberikan perhatian penuh kepada masyarakat Kashmir yang mengalami kesulitan dengan pandemi Covid-19, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tindakan-tindakan nyeleneh yang dilakukan India terhadap Kashmir mulai dari pemberlakuan 1 dokter

⁴⁰ Krishna, Article 370 and the Constituent Assembly Debates, https://www.constitutionofindia.net/blogs/article_370_and_the_constituent_assembly_debates.

⁴¹ Rizky Jaramaya, 'India Diminta Cabut Pembatasan Jaringan Komunikasi Kashmir', *Sindikasi.Republika.Co.Id*, 2019 <<https://sindikasi.republika.co.id/berita/pvwpql382/network>> [accessed 25 July 2023].

⁴² David and Sascha. hlm 48.

untuk 3900 pasien Covid-19, penutupan akses layanan kesehatan dan fasilitas umum, pemberlakuan jam malam yang sangat tidak efektif sehingga menyebabkan masyarakat Kashmir mengalami kesulitan dalam mencari nafkah.⁴³

Dengan diberlakukannya berbagai aturan yang tidak memberikan kemudahan terhadap masyarakat Kashmir selama Covid-19 tentunya menjadi bukti bahwa keamanan manusia dalam bidang kesehatan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan. Keamanan kesehatan masyarakat Kashmir terancam dan keterjaminan setiap individu dalam aspek keamanan kesehatan sesuai dengan yang dipaparkan oleh UNDP juga tidak tercapai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keamanan kesehatan masyarakat Kashmir tidak terjamin yang mana hal ini disebabkan oleh kelalaian India dan Pakistan akibat konflik yang terus terjadi antara kedua Negara tersebut selama pandemi Covid-19.

c. **Keamanan Komunal/Kelompok**

Dapat kita lihat bahwa keamanan kelompok atau komunal menjadi salah satu dampak dari adanya konflik antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir. Hal ini terbukti dengan kesewenangan India di Kashmir dengan melakukan tindakan tidak terpuji terhadap kelompok perempuan, kelompok aktivis dan kelompok buruh.

India mulai melakukan aksi tidak pantas terhadap kelompok perempuan, dimana kelompok perempuan dijadikan subjek pelampiasan hasrat pihak India.⁴⁴ Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak India selama konflik yang terjadi di Kashmir merupakan sebuah upaya dan strategi yang diklaim oleh India untuk menundukkan penduduk Kashmir agar patuh dan berpihak kepada India.⁴⁵ Banyak sekali tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pihak tentara India di Kashmir yang

⁴³ Fatzry Johan, 'Kekang COVID-19, India Perketat Pembatasan Di Wilayah Kashmir', *Liputan6.Com*, 2022 <<https://www.liputan6.com/photo/read/4860569/foto-kekang-covid-19-india-perketat-pembatasan-di-wilayah-kashmir?page=1>> [accessed 25 July 2023].

⁴⁴ Florence and others. hlm 274.

⁴⁵ Ahmad Shah. hlm 48.

dibuktikan dengan banyaknya laporan dari masyarakat Kashmir terkait tindak kekerasan seksual yang mereka alami selama konflik di Kashmir.⁴⁶

Selain kekerasan seksual terhadap kelompok perempuan, India juga melakukan pelanggaran terhadap kelompok aktivis. Selama terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Kashmir terhadap tindakan pencabutan hak otonom Kashmir, sejumlah aktivis ditangkap dan dipenjara oleh pihak India.⁴⁷ Hal ini dilakukan untuk meminimalisir aksi protes dan demonstrasi terhadap India atas pencabutan hak otonom Kashmir. Selain itu, pihak India juga menganggap bahwa kelompok aktivis ini dapat mempengaruhi masyarakat Kashmir untuk terus mengutarakan suara mereka terhadap pencabutan hak otonom Kashmir, oleh karena itu dilakukan penangkapan terhadap kelompok aktivis untuk meminimalisir aksi protes dan demonstrasi.

Pelanggaran lain yang dilakukan India adalah dengan melakukan pembunuhan terhadap kelompok buruh. Pihak India menganggap bahwa kelompok buruh di Kashmir banyak yang disokong oleh Pakistan sehingga mereka mendapatkan keberanian untuk menentang India dan berpihak pada Pakistan.⁴⁸ Dengan anggapan tersebut, pihak India kemudian mulai melakukan aksi pembunuhan terhadap kelompok buruh untuk menghentikan dukungan terhadap pihak Pakistan.

Dengan adanya pelanggaran berupa terjadinya kasus kekerasan terhadap kelompok perempuan, penangkapan terhadap kelompok aktivis dan pembunuhan terhadap kelompok buruh, kemudian menjadi bukti nyata bahwa konflik India dan Pakistan memberikan pengaruh terhadap keamanan kelompok/komunal yang mana

⁴⁶ DW, 'Mengapa India Mengerahkan Tentara Perempuan Ke Kashmir?', *tempo.com*, 2021 <<https://www.tempo.co/dw/5346/mengapa-india-mengerahkan-tentara-perempuan-ke-kashmir>> [accessed 25 July 2023].

⁴⁷ 'Polisi Tangkap Aktivis Kashmir Di Tengah Ketegangan', *Voa Indonesia*, 2019 <<https://www.voaindonesia.com/a/polisi-tangkap-aktivis-kashmir-di-tengah-ketegangan/4801722.html>> [accessed 25 July 2023].

⁴⁸ 'Gelombang Pembunuhan Hantui Buruh India Di Kashmir', DW, 2021 <<https://www.dw.com/id/gelombang-pembunuhan-hantui-buruh-india-di-kashmir/a-595>>.

telah melanggar keamanan manusia sesuai dengan aspek *Freedom From Want, Freedom From Fear dan Freedom From Indignity* serta tidak terjaminnya salah satu keamanan manusia yang harus dijunjung berdasarkan pemaparan UNDP yakni keamanan kelompok/komunal.

d. Keamanan Politik

Dalam aturan yang tertulis dalam pasal 370 konstitusi India yang mengatur terkait dengan hak otonom wilayah Kashmir, disana disebutkan bahwa Kashmir yang menjadi wilayah sengketa dan bersifat independen berhak untuk mengatur wilayahnya dan juga politik pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain termasuk didalamnya India dan Pakistan.⁴⁹ Jika melihat lebih dalam lagi terkait dengan pasal 370 konstitusi India, maka dapat dikatakan bahwa, pemerintahan di Kashmir hanya boleh dipegang oleh penduduk Kashmir asli. Selain itu, wilayah Kashmir hanya dapat diduduki oleh etnis Kashmir asli, sehingga tidak ada pihak luar yang dapat mengintervensi pemerintahan Kashmir.⁵⁰

Namun dengan adanya pencabutan hak otonom tersebut tentu saja akan mempengaruhi pemerintahan wilayah Kashmir, dimana masyarakat luar dapat dengan mudah menetap dan membeli tanah di Kashmir.⁵¹ Selain itu, pemerintahan dan birokrasi Kashmir yang awalnya hanya dapat dikelola oleh keturunan asli Kashmir sudah tidak berlaku lagi. Pihak luar dapat dengan bebas ambil andil dalam pemerintahan Kashmir dan hal ini tentu saja menimbulkan gejolak terhadap masyarakat Kashmir itu sendiri karena sejatinya yang mengerti keadaan masyarakat Kashmir adalah masyarakat Kashmir itu sendiri sehingga sulit bagi pihak luar untuk memahami keadaan masyarakat Kashmir.

⁴⁹ Krishna, "Constitution Of India".

⁵⁰ 'Article 370: What Happened with Kashmir and Why It Matters', *BBC*, 2019 <<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708>> [accessed 26 July 2023].

⁵¹ Sodhi Jahnvi, 'The Article 370 Amendments on Jammu and Kashmir: Explaining the Global Silence', *ORF (Observer Research Foundation)*, 2021 <<https://www.orfonline.org/research/article-370-amendments-on-jammu-and-kashmir/>> [accessed 26 July 2023].

Sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa keamanan politik di Kashmir terpengaruh dengan adanya pencabutan hak otonom ini dimana dengan pencabutan hak otonom Kashmir melanggar keamanan manusia dalam penjaminan terhadap *Freedom From Indignity* yakni kebebasan untuk mendapatkan kebebasan dan kelayakan hidup sehingga terjaminnya kesejahteraan setiap individu.

4. Upaya penyelesaian konflik India Pakistan di wilayah Kashmir

Upaya penyelesaian konflik antara India dan Pakistan memang sudah berlangsung sejak lama, namun tidak pernah ada titik temu antara kedua Negara terhadap persengketaan wilayah Kashmir. Sejak meningkatnya konflik India Pakistan, sudah banyak cara yang dilakukan untuk mencapai perdamaian bagi kedua actor yang terlibat, namun nihil.

Langkah pertama yang ditempuh oleh India dan Pakistan dalam mencapai perdamaian selama konflik adalah dengan melakukan perjanjian Asesi. Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian penggabungan wilayah India dan Kashmir sebagai langkah awal untuk mencapai perdamaian.⁵² India sebagai pihak yang mendapat banyak kelebihan dari perjanjian ini mulai melakukan kesewenangan dan mengakibatkan munculnya kemarahan Pakistan. Kedua Negara kemudian kembali bersitegang dan melanggar perjanjian ini, dimana Pakistan menolak perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati. Hal ini kemudian membuat India dan Pakistan kembali berkonflik.

Gagalnya perjanjian Asesi yang dilakukan kedua actor Negara tersebut menjadi momok awal kembalinya ketegangan di wilayah Kashmir. India dan Pakistan mencoba mencari cara lain agar ketiga pihak yang terlibat baik India, Pakistan dan Kashmir sama – sama mendapat keadilan. India dan Pakistan akhirnya melakukan perjanjian SIMLA (*Simla Agreement*), dimana perjanjian ini berisikan perjanjian damai antara India dan Pakistan yang mengharuskan kedua Negara untuk melakukan aksi gencatan senjata tanpa

⁵² Hakim and Sasiyin. hlm 44.

ada intervensi pihak luar.⁵³ Perjanjian ini awalnya berjalan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu kedua Negara kembali bersitegang dan melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Setelah banyaknya masalah dan pelanggaran yang terjadi di Kashmir yang diakibatkan oleh adanya konflik antara India dan Pakistan mulai dari pembatasan hak untuk berpendapat dan berbicara, pencabutan hak untuk hidup dengan sejahtera hingga pengabaian akan kebutuhan mendasar, akhirnya pada tahun 2021 kedua Negara tersebut sepakat untuk melakukan aksi gencatan senjata yang dibuktikan dengan penandatanganan surat perjanjian gencatan senjata yang berlaku mulai tahun 2021 hingga kurun waktu yang tidak ditentukan.⁵⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konflik yang terjadi antara India dan Pakistan terhadap keamanan manusia di wilayah Kashmir memberikan dampak dan pengaruh yang sangat serius terhadap keamanan manusia khususnya keamanan personal atau Individu. Konflik yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menguasai wilayah Kashmir secara utuh telah menimbulkan banyak sekali korban jiwa yang juga diiringi dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan terhadap masyarakat sipil Kashmir. Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan telah mengancam keamanan personal di segala aspek seperti politik, social, lingkungan, kelompok, kesehatan hingga ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi antara India dan Pakistan ini secara mendasar sangat mengancam keamanan personal serta penyelesaian konflik antara kedua Negara tersebut masih belum menemukan titik akhir. Dengan hal ini, peluang adanya pelanggaran lain dan jatuhnya korban masih akan terus berlanjut kedepannya.

⁵³ Government of India Ministry of External Affairs, 'Agreement Between The Government Of India And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Bilateral Relations (SIMLA Agreement).

⁵⁴ Danish Ismail, 'India, Pakistan Sepakat Hentikan Baku Tembak Di Wilayah Kashmir', *Antara News*, 2021 <<https://www.antaraneews.com/berita/2017278/india-pakistan-sepakat-hentikan-baku-tembak-di-wilayah-kashmir>> [accessed 26 February 2023].

Daftar Pustaka

- 3 *Negara Yang Memperebutkan Wilayah Kashmir*, *Sindo News* (Jakarta, 2022) <<https://international.sindonews.com/read/873327/45/3-negara-yang-memperebutkan-wilayah-kashmir-1662030573>>
- Ahmad Shah, Mubashir, 'Human Rights Violation in Kashmir With Special Reference to Women', *International Journal Of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 7.1 (2020), 10–14 <<https://www.ijrar.org/papers/IJRAR2001136.pdf>>
- 'Article 370: What Happened with Kashmir and Why It Matters', *BBC*, 2019 <<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708>>
- Ayunda, Krisna, and Rhoma Aria, 'Konflik India Dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970)', *Jurnal Elektronik Mahasiswa*, 4.6 (2017), 911–25
- 'Bom Di Kashmir: 40 Polisi Tewas, India Salahkan Kelompok Muslim Di Pakistan', *BBC News Indonesia*, 2019 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47248432>>
- David, Bosold, and Werthes Sascha, 'Human Security in Practice: Canadian and Japanese Experiences', *Journal of International Studies*, 2015, 227–47 <https://doi.org/10.1007/978-3-319-97247-3_11>
- DW, 'Kashmir: Setahun Terkunci Dan Kehilangan Otonomi', *Tempo*, 2020 <<https://www.tempo.co/dw/3065/kashmir-setahun-terkunci-dan-kehilangan-otonomi>>
- , 'Mengapa India Mengerahkan Tentara Perempuan Ke Kashmir?', *Tempo.Com*, 2021 <<https://www.tempo.co/dw/5346/mengapa-india-mengerahkan-tentara-perempuan-ke-kashmir>>
- Fareed, Rifat, 'Kashmir: Setahun Terkunci Dan Kehilangan Otonomi', *Dw.Com*, 2020 <<https://www.dw.com/id/kashmir-setahun-terkunci-dan-kehilangan-otonomi/a-54440870>>
- Florence, Ines, Tabita Hutauruk, Mohamad Rosyidin, and Satwika Paramasatya, 'Pelanggaran HAM Di Kashmir Sebagai Dampak Dari Sengketa Wilayah India-Pakistan', *Journal Of International Relations*, 8.3 (2022), 271–80 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi%0APelanggaran>>
- 'Gelombang Pembunuhan Hantui Buruh India Di Kashmir', *Dw.Com*, 2021 <<https://www.dw.com/id/gelombang-pembunuhan-hantui-buruh-india-di-kashmir/a-59538985>>
- Hakim, Ahmad Burhan, and Moh Sasiyin, 'Khasmir Dalam Pusaran Konflik Antara India Dan Pakistan', *Journal Of International Relations*, 1.1 (2022), 40–49 <<https://doi.org/10.36232>>

- Hariz, Barak, 'Konflik India - Pakistan, Kedua Negara Sepakati Pertukaran Informasi Nuklir Dan Tahanan', *Liputan6.Com*, 2023 <<https://www.liputan6.com/global/read/5169203/konflik-india-pakistan-kedua-negara-sepakati-pertukaran-informasi-nuklir-dan-tahanan>>
- Hwang, Wonjune, 'Kashmir as a Symbol of Pakistan: Why Violence in Kashmir Never Stop?', *Jurnal Politik Internasional*, 21.1 (2019), 27–47 <<https://doi.org/10.7454/global.v21i1.360>>
- 'India Sebut 500 Demo Terjadi Di Kashmir, Korban Luka Ratusan', *CNN Indonesia*, 2019 <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190828181327-113-425463/india-sebut-500-demo-terjadi-di-kashmir-korban-luka-ratusan>>
- Institute Of Human Rights, Inter-American, 'What Is Human Security?', *Iidh.Ed.Cr* <https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contenidoid=ea75e2b1-9265-4296-9d8c-3391de83fb42&Portal=IIDHSeguridadEN#tres>
- Ismail, Danish, 'India, Pakistan Sepakat Hentikan Baku Tembak Di Wilayah Kashmir', *Antara News*, 2021 <<https://www.antaraneews.com/berita/2017278/india-pakistan-sepakat-hentikan-baku-tembak-di-wilayah-kashmir>>
- Jahnvi, Sodhi, 'The Article 370 Amendments on Jammu and Kashmir: Explaining the Global Silence', *ORF (Observer Research Foundation)*, 2021 <<https://www.orfonline.org/research/article-370-amendments-on-jammu-and-kashmir/>>
- Jaramaya, Rizky, 'India Diminta Cabut Pembatasan Jaringan Komunikasi Kashmir', *Sindikasi.Republika.Co.Id*, 2019 <<https://sindikasi.republika.co.id/berita/pvwpql382/network>>
- Johan, Fatzry, 'Kekang COVID-19, India Perketat Pembatasan Di Wilayah Kashmir', *Liputan6.Com*, 2022 <<https://www.liputan6.com/photo/read/4860569/foto-kekang-covid-19-india-perketat-pembatasan-di-wilayah-kashmir?page=1>>
- 'Kashmir: Mengapa Kekerasan Terbaru Membuat Dunia Sangat Khawatir?', *Bbc.Com* (Jakarta, 20 February 2019) <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47296254>>
- , *BBC News Indonesia*, 2019 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47296254>>
- Khofifah, Lina Nur, Ika Riswanti Putranti, and Marten Hanura, 'Intervensi Kemanusiaan Dalam Upaya Penanganan Isu Pelanggaran HAM Penduduk Kashmir Pasca Pencabutan Hak Otonomi Khusus Wilayah', *Journal of International Relations*, 8.3 (2022), 367–76 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/34425%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/34425/27158>>
- Krishna, Vineeth, 'Article 370 and the Constituent Assembly Debates', *Constitution Of India*, 2019

<https://www.constitutionofindia.net/blogs/article_370_and_the_constituent_assembly_debates>

‘Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir Oleh India Dianggap Kontroversial? Tiga Hal Yang Layak Diketahui’, *BBC News*, 2019
<<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49250404>>

Ministry of External Affairs, Government of India, ‘AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON BILATERAL RELATIONS (SIMLA AGREEMENT)’, *Mea.Gov.In* (Republic of India: Ministry of External Affairs Government of India, 1972) <<https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5541/Simla+Agreement>>

Muhaimin, ‘India Dan Pakistan Perang Singkat Di Tengah Wabah Corona’, *Sindo News*, 2020
<<https://international.sindonews.com/read/144/40/india-dan-pakistan-perang-singkat-di-tengah-wabah-corona-1586711072>>

Mukti, Demita Ayuwanda, and Anggun Puspitasari, ‘Dampak Konflik India-Pakistan Di Wilayah Kashmir Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019’, *Journal of Contemporary Diplomacy*, 4.2 (2019), 104–14
<<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/223/103>>

Pakistan: Perkembangan Dalam Negara Pakistan (Jakarta, 2022)
<<https://kemlu.go.id/islamabad/en/read/pakistan/2374/etc-menu>>

‘Polisi Tangkap Aktivis Kashmir Di Tengah Ketegangan’, *Voa Indonesia*, 2019
<<https://www.voaindonesia.com/a/polisi-tangkap-aktivis-kashmir-di-tengah-ketegangan/4801722.html>>

Prof. Dr. Suryana, MSi., *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Universitas Pendidikan Indonesia* (Bandung, 2012)
<<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>>

Puspaningrum, Burnadette Aderi, ‘Daftar Negara Di Asia Selatan: Ibu Kota, Ekonomi Dan Populasinya’, *KOMPAS.Com*, 2022
<<https://www.kompas.com/global/read/2022/07/27/180000770/daftar-negara-di-asia-selatan--ibu-kota-ekonomi-dan-populasinya?page=all>>

Remacle, Eric, ‘Approaches to Human Security : Japan , Canada , and Europe in Comparative Perspective’, *The Journal of Social Science* 66, 8, 2008, 5–34

Rufinaldo, Rhany Chairunissa, ‘EKSKLUSIF – Covid-19 Dan Kekerasan Yang Tak Kunjung Reda Ciptakan Kekacauan Di Kashmir’, *Ankara*, 2020
<<https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/eksklusif-covid-19-dan-kekerasan-yang-tak-kunjung-reda-ciptakan-kekacauan-di-kashmir/1841708>>

Ruslan, Muhammad, ‘Pemikiran Pembentukan Negara Pakistan’ (Institusi Agama Islam

- Negeri Sumatera Utara, 2012) <<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1421>>
- Sudiar, Sonny, 'Pendekatan Keamanan Manusia Dalam Studi Perbatasan Negara', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7.2 (2019), 153–60
<<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.72139>>
- Syahrial, Muhama, 'Daftar Negara Dengan Militer Terkuat Di Dunia 2022 Versi GFP', 2022
<[https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/02/170000081/daftar-negara-dengan-militer-terkuat-di-dunia-2022-versi-gfp?page=all#:~:text=Pakistan berada di posisi kesembilan,2022 dengan skor PwrIdx%3A 0.1572.&text=Kekuatan angkatan darat Pakistan%3A 2.824,da](https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/02/170000081/daftar-negara-dengan-militer-terkuat-di-dunia-2022-versi-gfp?page=all#:~:text=Pakistan%20berada%20di%20posisi%20kesembilan,2022%20dengan%20skor%20PwrIdx%3A%200.1572.&text=Kekuatan%20angkatan%20darat%20Pakistan%3A%202.824,da)>
- Syauqi, Ahmad, 'Konflik India Pakistan Dan Stabilitas Keamanan Regional Asia Selatan', *Digital Repository Universitas Jember* (Universitas Jember, 2002)
<<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/81764>>
- Tadjibaeva, Dildora, *Human Security Concept and Measurement, Occasional Paper* (New Delhi, 2000)
<https://www.academia.edu/download/31598206/Human_security_concept_and_measurement.pdf>
- United Nations, 'WHAT IS HUMAN SECURITY', *United Nations Trust Fund For Human Security* <<https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/>>
- Volger, Helmut, and Kofi Annan, *Human Development Reports, United Nations Development Programme* (New York, 1994) <https://doi.org/10.1163/9789004481206_047>